KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI	NO SOP	W.20- 2915.OT.02.02 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	23 Mei 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Wahyu Eka Putra NIP. 198105222000121002
	NAMA SOP	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 4. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor207/PMK.06/2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang MIlik Negara 6. PMK Nomor 4 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 7. PMK No. 4/PMK.6/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang ke Pengguna Barang	1. Mengetahui peraturan-peraturan terkait tata cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. 2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Penatausahaan BMN	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet 3. Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak tertib administrasi	Disimpan sebagai data Elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		KPA	Kepala Bagian TU dan Umum	Operator BMN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisi surat Sekretaris Jenderal terkait Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	Mulai			Surat dari Sekretaris Jenderal (Biro Pengelolaan BMN)	5 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaah disposisi KPA dan Melakukan koordinasi serta memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara serta konsep Surat pengantar				Disposisi KPA	15 Menit	Arahan dan konsep penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	
3	Mengisi form Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan mengetik konsep Surat Pengantar		T		Arahan dan konsep penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	2 Hari	Form A,B,C Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Konsep surat pengantar	Form Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sesuai dengan format dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar yang sesuai dengan PMK Nomor 207/MK.06/2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN
4	Memverifikasi form yang telah disusun dan surat pengantar kemudian Menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta jajaran			Y	Form A,B,C Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Konsep surat pengantar	15 Menit	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN beserta Konsep Surat Pengantar dan dokumen pendukung	
5	Menandatangani Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN beserta Surat Pengantar dan dokumen pendukung	Selesai	Y		Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN beserta Konsep Surat Pengantar dan dokumen pendukung yang telah disetujui	15 Menit	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN beserta Surat Pengantar dan dokumen pendukung yang telah ditandatangani	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi